



DISHUB
KOTA DUMAI
www.dishub.dumaikota.go.id



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Isu Strategis.....	5
1.5 Cascading Kinerja.....	6
1.6 Peta Proses Bisnis.....	8
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN	
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Tujuan dan Sasaran	11
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	13
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN	
3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	19
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023	33
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra.....	36
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target/SPM)	38
3.5 Akuntabilitas Keuangan	39
3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	40
3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
3.8 Prestasi dan Penghargaan	43
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR LAMPIRAN DINAS PERHUBUNGAN

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Dumai
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 beserta Lampiran Perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023
7. Penghargaan

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023	xii
Tabel 2	Program Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023	xiii
Tabel 3	Perubahan Program Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai	xiii
Tabel 4	Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	xiv
Tabel 5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023	xv
Tabel 6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023.....	xvi
Tabel I. 1	Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023	9
Tabel I. 2	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	9
Tabel II. 1	Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023.....	12
Tabel II. 2	Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023 ...	13
Tabel II. 3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023.....	14
Tabel II. 4	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023	15
Tabel II. 5	Program Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai	15
Tabel II. 6	Program Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Dumai	16
Tabel III. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel III. 2	Atribut Capaian Indikator Kinerja	19
Tabel III. 3	Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	20
Tabel III. 4	Perkembangan Jumlah Kendaraan di Kota Dumai Tahun 2022 dan 2023.....	31
Tabel III. 5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	33
Tabel III. 6	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	37
Tabel III. 7	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	38
Tabel III. 8	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	40
Tabel III. 9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	41
Tabel III. 10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
Tabel Iii. 11	Prestasi dan Penghargaan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai.....	4
Gambar I. 2	Cascading Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai.....	7
Gambar I. 3	Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kota Dumai.....	8
Gambar II. 1	Misi ke - 3 Kota Dumai.....	11
Gambar III. 1	Dokumentasi Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023	22
Gambar III. 2	Dokumentasi Pengadaan Alat Penerangan Jalan di Kota Dumai Tahun 2023	26
Gambar III. 3	Dokumentasi Pembuatan/Pengecatan Marka Jalan di Kota Dumai Tahun 2023	27
Gambar III. 4	Dokumentasi Alat Pendukung Kegiatan LLAJ di Kota Dumai Tahun 2023	29

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang perhubungan efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Perhubungan

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Perhubungan Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Dumai, 10 Januari 2024

KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI



SAID EFFENDI, SE

Pembina

NIP. 19800201 200604 1 013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Walikota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, maka sebagai unsur teknis, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kota Dumai menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
4. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan

6. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Perhubungan Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 3 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 yaitu “Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas“ dan SASARAN yang ke 1 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu “Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan“

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Dumai 2021 - 2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 - 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 3 (tiga) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C terintegrasi secara elektronik
4. Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
7. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

III. Program Pengelolaan Pelayaran

1. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai pada Tahun 2023 mengalami 1 kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai pada Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Indikator keberhasilan yaitu persentase penyediaan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	56%
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	61%
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	60%
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km : 90.081 unit

Sumber data : Perjanjian Kinerja Perubahan Dishub Kota Dumai, 2023

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 46.162.912.299,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) untuk melaksanakan 2 (dua) Program Kerja antara lain :

Tabel 2
Program kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 46.012.912.299,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 150.000.000,-	APBD
J U M L A H		Rp 46.162.912.299,-	APBD

Sumber data : Dishub Kota Dumai, 2023

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Perubahan Program kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 46.012.912.299,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 150.000.000,-	APBD
J U M L A H		Rp 46.162.912.299,-	APBD

Sumber data : Dishub Kota Dumai, 2023

Dinas Perhubungan Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	56%	56%	100%	✓			
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	61%	89%	146%	✓			
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	60%	88%	147%	✓			
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km : 90.081 unit	1.198,23 km : 94.842 unit	95%	✓			

Sumber data : Dishub Kota Dumai, 2023

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori 1 (satu) yaitu SANGAT BERHASIL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 74.605.852.140,00 (*Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*) bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 63.942.061.307,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*) dan BELANJA MODAL sebesar Rp 10.663.790.833,00 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*)

1. Belanja Operasi	:	Rp	63.942.061.307,00
2. Belanja Modal	:	Rp	10.663.790.833,00
Jumlah	:	Rp	74.605.852.140,00

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	65%					
Sasaran: Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	56%	56%	100%			
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	61%	89%	146%			
	Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	60%	88%	147%			
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km: 90.081 unit	1.198,23 km : 94.842 unit	95%			
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	95%	100%	105%	46.712.912.299,00	46.268.560.826,80	99,05%
Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase Tersedianya Prasarana Pelayanan sesuai Kewenangan Kota	20%	20%	100%	150.000.000,00	149.940.230,00	99,96%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	100%	100%	100%	27.742.939.841,00	26.508.382.311,59	95,55%

Sumber data : Dishub Kota Dumai Tahun 2023

Sebagaimana uraian tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi		Keterangan
1	2	3	4	5	6		7
1.	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Persentase Prasarana Transportasi	100%	99,05	1,01	Efisien	-
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	146%	99,05	1,47	Efisien	-
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	147%	99,05	1,48	Efisien	-
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	95%	99,05	0,96	Kurang Efisien	

Sumber data : Dishub Kota Dumai Tahun 2023

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1* yaitu *Persentase Prasarana Transportasi* tingkat efisiensinya adalah 1,01 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2* yaitu *Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang* adalah 1,47 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (146%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama 3* yaitu *Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* tingkat efisiensinya adalah 1,48 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (147%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

- d. Pada *Indikator Kinerja Utama 4* yaitu *Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan* tingkat efisiensinya adalah 0,96 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (95%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori ***KURANG EFISIEN***;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E/Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (8.38.A/2021));
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).
5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 17 Seri D);

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kota Dumai dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D) dan dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

7. Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
8. Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
10. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
11. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
12. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai terdiri dari :

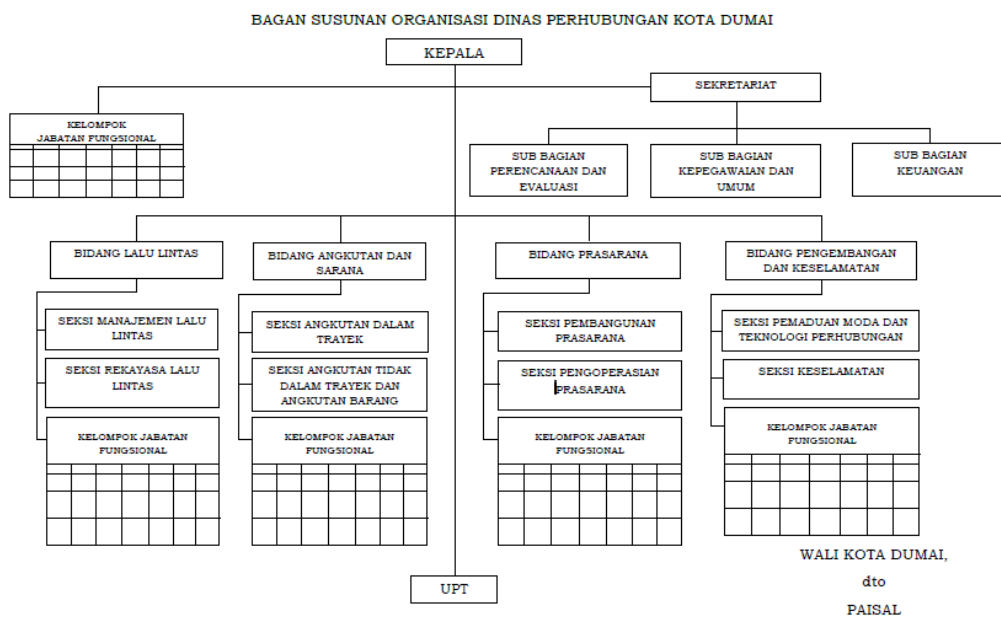
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian yakni :
 - 2.1 Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2.2 Subbagian Keuangan; dan
 - 2.3 Subbagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - 3.1 Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - 3.2 Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 3.3 Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Prasarana, membawahi :
 - 4.1 Seksi Pembangunan Prasarana
 - 4.2 Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - 4.3 Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Angkutan dan Sarana, membawahi :
 - 5.1 Seksi Angkutan Dalam Trayek;
 - 5.2 Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
6. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi :
 - 6.1 Seksi Keselamatan
 - 6.2 Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
 - 6.3 Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Dumai didukung dengan adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagai berikut:

1. UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A, yang terdiri dari:
 - 1.1 Kepala UPT ; dan
 - 1.2 Kasubbag Tata Usaha
2. UPT. Perparkiran, yang terdiri dari:
 - 2.1 Kepala UPT ; dan
 - 2.2 Kasubbag Tata Usaha

Gambar I.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

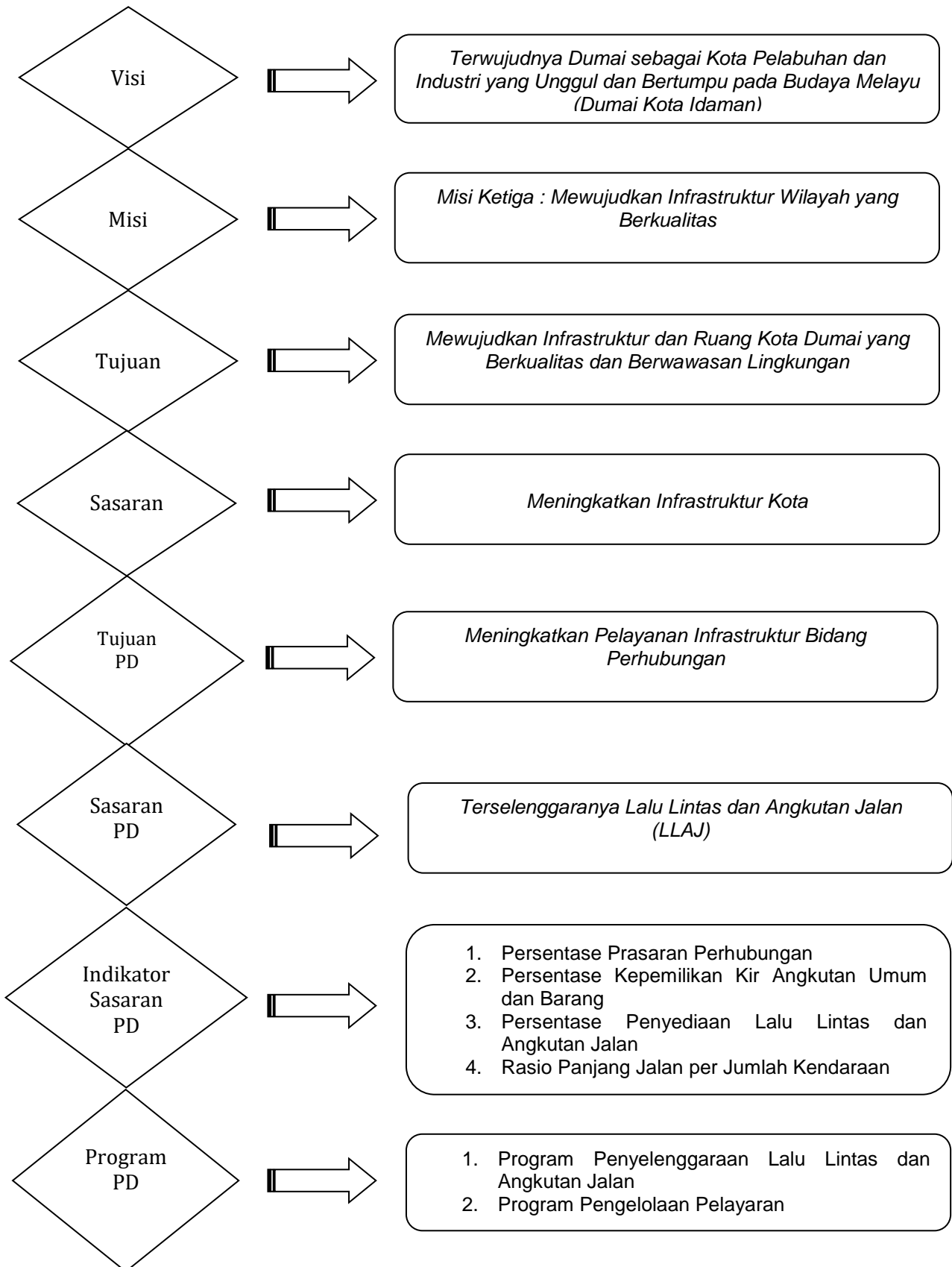
Isu strategis terkait dengan urusan Perhubungan yang perlu ditangani sebagai berikut :

1. belum optimalnya perencanaan di bidang perhubungan darat, laut dan udara;
2. tingginya pelanggaran *Over Dimension Over Loading* (ODOL) sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan yang berdampak kepada keselamatan pengguna jalan;
3. tingginya tingkat penggunaan angkutan pribadi dibandingkan angkutan umum;
4. peningkatan volume lalu lintas di bandingkan kapasitas jalan yang tersedia;
5. masih kurangnya pendidikan dan pelatihan teknis perhubungan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) perhubungan;
6. keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung konektivitas antar wilayah;
7. belum tertatanya sistem perparkiran di tepi jalan umum;
8. angkutan umum tergeser dengan adanya transportasi berbasis online yang semakin menjamur.

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Perhubungan Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I. 2
Cascading Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai



1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Perhubungan sebagaimana skema berikut:

Gambar I. 3
Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kota Dumai

PROSES BISNIS / Sasaran		SUB PROSES BISNIS / Strategi		Peta Lintas Fungsi / Arah Kebijakan / Kegiatan (pilih "Arah Kebijakan" saja atau	
1		2		3	
Kode	PROSES UTAMA	Kode		Kode	
HUB 01	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	HUB 01.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	HUB 01.01.01	Melaksanakan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ serta Menetapkan Kebijakan dan Sosialisasi
		HUB 01.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	HUB 01.02.01	Menyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota seperti Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat, dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan Luar Badan Jalan
HUB 02	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	HUB 02.01	Melaksanakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	HUB 02.01.01	Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala, serta Penyediaan Bukti Lulus Uji Berkala
		HUB 02.02	Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	HUB 02.02.01	Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang serta Pengamanan Angkutan selama Ramadhan, Lebaran, Natal dan Tahun Baru
		HUB 02.03	Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	HUB 02.03.01	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Jalan Kabupaten/Kota
HUB 03	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Perhubungan	HUB 03.01	Meningkatkan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Parkir Tepi Jalan Umum serta Pengujian Kendaraan Bermotor	HUB 03.01.01	Peningkatan Kapasitas SDM serta Sarana dan Prasarana Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Parkir Tepi Jalan Umum serta Pengujian Kendaraan Bermotor

Sumber data : Peta Proses Bisnis Dishub Kota Dumai, 2023

1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1311.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Perhubungan Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel I.1
Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Dalam rangka mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah di Kota Dumai mendatang, khususnya pada Dinas Perhubungan, maka terdapat beberapa rekomendasi perbaikan demi terwujudnya pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil	<p>Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan cermat dalam menyusun LKjIP khususnya terkait dengan pengungkapan seluruh informasi dan perbandingan capaian kinerja</p> <p>Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi APiP atas hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022</p>

Sumber data : LHE Dishub Kota Dumai, 2023

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel I. 2
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	<p>Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 mendatang, Dinas Perhubungan Kota Dumai akan lebih cermat dalam penyampaian narasi perbandingan capaian kinerja perangkat daerah, yakni perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu, perbandingan dengan target di level nasional (<i>benchmark</i>) serta penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.</p> <p>Output : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023</p>	15 Januari 2024
2.	<p>Dinas Perhubungan Kota Dumai telah menindaklanjuti rekomendasi APiP atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022, RATL tersebut dapat dilihat pada link: https://drive.google.com/file/d/1Abr4fbfhR4Vn0zRCzwml6bHXHGmROjTC/view?usp=sharing</p> <p>Output : Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022</p>	21 Agustus 2023

Sumber data : Matrik Tindak Lanjut LHE Dishub Kota Dumai, 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Dinas Perhubungan Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Perhubungan Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

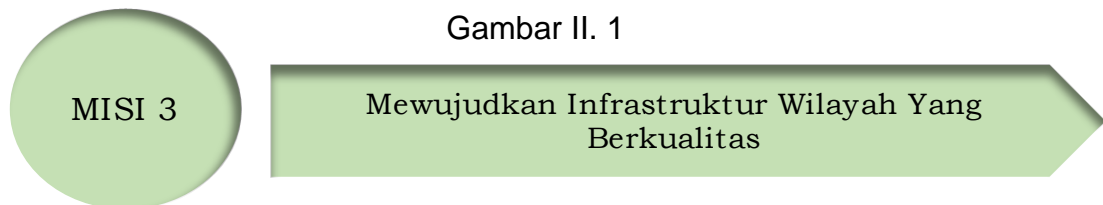
Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Perhubungan Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Perhubungan Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Perhubungan Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II. 1
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)					
MISI KE 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	59,26 Indeks	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	60,77%

Sumber: RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026

2.3 Kebijakan, Strategi dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Perhubungan Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel II. 2
Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)			
MISI KE 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Indikator keberhasilan yaitu persentase tersedianya sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan, Pemeliharaan/Perbaikan, Peningkatan kualitas infrastruktur Bidang Perhubungan	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur bidang perhubungan

Sumber data : Renstra Perubahan Dishub Kota Dumai 2021-2026

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3. Program Pengelolaan Pelayanan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II. 3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Indikator keberhasilan yaitu persentase penyediaan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Sumber data : Perubahan Renstra Dishub Kota Dumai 2021-2026

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 4
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Indikator keberhasilan yaitu persentase penyediaan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	56%
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	61%
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	60%
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km : 90.081 unit

Sumber data : Perjanjian Kinerja Dishub 2023

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 46.162.912.299,- (*Empat Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) untuk melaksanakan 2 (dua) Program Kerja antara lain :

Tabel II. 5
Program kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 19.846.555.799,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 150.000.000,-	APBD
J U M L A H		Rp 19.996.555.799,-	APBD

Sumber data : DPA Dishub Kota Dumai, 2023

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 6
Perubahan Program kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 46.012.912.299,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 150.000.000,-	APBD
J U M L A H		Rp 46.162.912.299,-	APBD

Sumber data : DPPA Dishub Kota Dumai, 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres Nomor 29 Tahun 2014).

Dinas Perhubungan Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

- a. Rumus : $capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

- b. Rumus : $capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel III. 2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dinas Perhubungan Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel III. 3 dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel III. 3
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023				
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian	
1.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	60%	100%	-	-	-	-	
2.		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	42%	70%	61%	89%	146%	Sangat Berhasil	
3.		Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	55%	98%	-	-	-	-	
4.		Persentase Pembangunan Prasarana Jalan	48%	100%	-	-	-	-	
5.		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	67.21	-	1.198,23 km : 90.081 unit	1.198,23 km : 94.842 unit	95%	Sangat Berhasil	
6.		Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	-	-	56%	56%	100%	Sangat Berhasil
7.		Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	-	60%	88%	147%	Sangat Berhasil	

Sumber data: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang

- a. Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 61% realisasi sebesar 89% tercapai 146% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 42% atau tercapai sebesar 70% maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 76%.

Formulasi yang digunakan dalam penghitungan indikator ini yakni:

$$\frac{\text{Jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki Kir pada tahun } n}{\text{Jumlah angkutan umum dan barang pada tahun } n} \times 100\%$$

Jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki Kir pada tahun 2023 sebanyak 3.664 unit Jumlah angkutan umum dan barang yang wajib uji di tahun 2023 sebanyak 4.121 unit sehingga realisasi untuk Indikator ini sebesar 89%.

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Komitmen Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
- UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengujian yang memadai;
- Dibangunnya aplikasi Alat Uji guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengujian.

c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang adalah sebagai berikut:

- Belum seluruh kendaraan wajib uji yang melakukan pengujian kendaraan bermotor;
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian laik jalan kendaraan dan uji emisi gas buang kendaraan

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang adalah sebagai berikut:

- Kedepannya Dinas Perhubungan Kota Dumai akan melaksanakan Sosialisasi terkait pentingnya pengujian kendaraan bermotor demi keselamatan pengguna jalan di jalan;
- Bekerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan uji emisi gas buang kepada masyarakat di Kota Dumai;

- Melengkapi sarana dan prasarana pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor yang lebih representatif guna memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

Gambar III. 1
Dokumentasi Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tahun 2023



2. Indikator Persentase Prasarana Transportasi

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Prasarana Transportasi menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 56% realisasi sebesar 56% tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 60% atau tercapai sebesar 100% maka capaian tahun 2023 sama dengan capaian di tahun 2022 yakni 100%, meskipun realisasi di tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan Indikator Kinerja yang dihitung di tahun 2022 lebih umum yakni sarana dan prasarana perhubungan sedangkan di tahun 2023 lebih spesifik terkait prasarana transportasi yang ada di Kota Dumai atau kondisi eksisting saat ini yakni:

- Terminal Penumpang Tipe A;
- Bandara Udara Pinang Kampai;
- Pelabuhan Penumpang Pelindo;
- Pelabuhan Penumpang Ro-Ro; dan
- Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jl. Sultan Syarif Qasim

Formulasi yang digunakan dalam penghitungan Indikator ini yakni:

$$\frac{\text{Jumlah prasarana transportasi pada tahun } n}{\text{Jumlah prasarana transportasi yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$$

Jumlah prasarana transportasi pada tahun 2023 sebanyak 5 unit dengan target 9 unit sehingga terealisasi 56%.

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Prasarana Transportasi sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam menetapkan target telah memperhitungkan kondisi eksisting prasarana perhubungan yang ada dan kebutuhan prasarana yang akan datang sehingga dalam penetapan targetnya sesuai dengan perencanaan;
- Kota Dumai telah memiliki prasarana transportasi darat, laut dan udara yang sangat membantu konektivitas antar wilayah bagi masyarakat pengguna jasa di bidang perhubungan.

c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Prasarana Transportasi adalah sebagai berikut:

- Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan/pembangunan prasarana transportasi, seperti contohnya Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang merupakan simpul transportasi perkotaan yang sampai saat ini Kota Dumai belum memilikinya;
- Prasarana Transportasi yang ada di Kota Dumai didominasi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Kementerian Perhubungan.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Prasarana Transportasi adalah sebagai berikut:

- Kedepannya Dinas Perhubungan Kota Dumai akan berupaya memberikan pelayanan terbaik di bidang perhubungan khususnya terkait transportasi di Kota Dumai dengan menata kembali trayek perkotaan;
- Membangun Terminal Penumpang Tipe C sebagai simpul transportasi perkotaan yang DED nya telah disusun pada tahun 2023;

3. Indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 60% realisasi sebesar 88% tercapai 147% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 50% atau tercapai sebesar 100% maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 47%.

Indikator Kinerja Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan Indikator Kinerja yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan dokumen RPJMD Kota Dumai dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang awalnya terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja “Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan” dan “Persentase Pembangunan Prasarana Jalan” sehingga menjadi “Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yang diukur dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia pada Tahun } n}{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$$

Sesuai amanat Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 25 disebutkan bahwa “Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- Rambu lalu lintas
- Marka jalan
- Alat pemberi isyarat lalu lintas
- Alat penerangan jalan
- Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan
- Alat pengawasan dan pengaman jalan
- Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat; serta
- Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan atau diluar badan jalan.

Untuk indikator ini dapat dirincikan bahwa perlengkapan jalan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 yakni:

- Rambu Lalu Lintas, yang terpasang di Tahun 2023 sebanyak 216 unit terdiri dari : Pengadaan Papan Nama Jalan sebanyak 130 Unit dan Pengadaan Rambu Tiang Tunggal sebanyak 86 Unit. Target Pengadaan Rambu Lalu Lintas di Tahun 2023 yakni 300 Unit sehingga persentase capaian nya sebesar 72%.
- Alat Penerangan Jalan, yang terpasang di Tahun 2023 sebanyak 991 Unit dengan rincian sebagai berikut:
 - Kecamatan Dumai Selatan : 223 Unit
 - Kecamatan Sungai Sembilan : 175 Unit
 - Kecamatan Medang Kampai : 92 Unit
 - Kecamatan Dumai Kota : 125 Unit
 - Kecamatan Bukit Kapur : 92 Unit
 - Kecamatan Dumai Barat : 129 Unit
 - Kecamatan Dumai Timur : 155 Unit

Jumlah Alat Penerangan Jalan yang ditargetkan tersedia di Tahun 2023 sebanyak 800 Unit. Sehingga realiasi capaian nya sebesar 124% atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Gambar III. 2
Dokumentasi Pengadaan Alat Penerangan Jalan di Kota Dumai
Tahun 2023

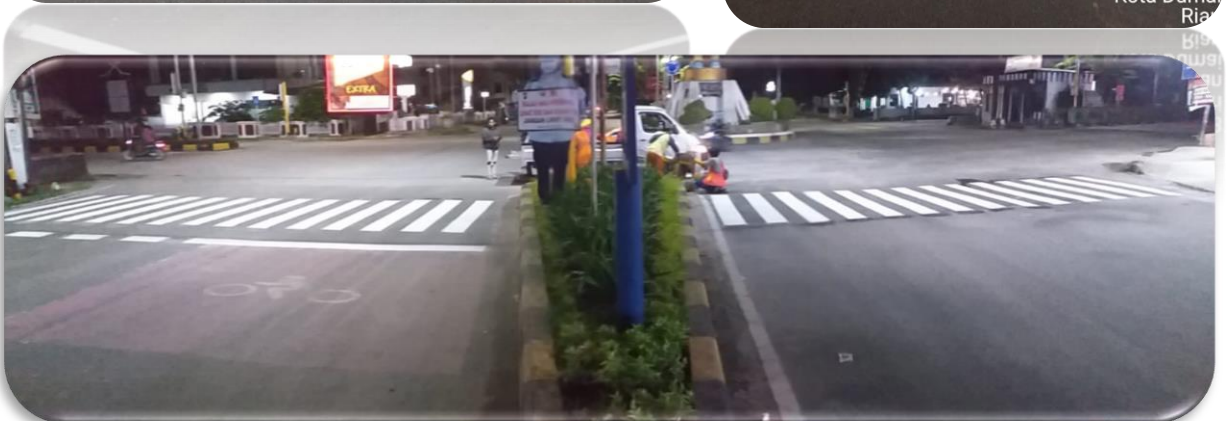


- Marka Jalan, yang telah tersedia di Kota Dumai pada Tahun 2023 berada di 8 Lokasi yakni:

- Marka Jalan Pattimura : 87 m²
- Marka Jalan Sukajadi : 621 m²
- Marka Jalan Sultan Syarif Kasim : 666 m²
- Marka Jalan Budi Kemuliaan : 354 m²
- Marka Jalan Abudl Rab Khan : 136 m²
- Marka Jalan Sidorejo : 125 m²
- Marka Jalan Tega Lega : 140 m²
- Marka jalan H. R Soebrantas : 368 m²

dan Target yang ditetapkan untuk pembuatan dan pengecatan marka jalan di Tahun 2023 yakni sebanyak 15 Lokasi, sehingga realisasi capaian nya sebesar 53%

Gambar III. 3
Dokumentasi Pembuatan/Pengecatan Marka Jalan di Kota Dumai
Tahun 2023





- Alat Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa Warning Light (2 Unit), Cermin Tikungan (4 Unit) dan Paku Jalan (500 Unit) dengan total 506 Unit dan Target yang ditetapkan di Tahun 2023 sebanyak 500 Unit, sehingga realisasi capaian nya sebesar 101% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Gambar III. 4
Dokumentasi Alat Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
di Kota Dumai Tahun 2023



Sehingga jika dirata-ratakan seluruh pengadaan perlengkapan jalan di Tahun 2023 sebesar 88% dari target yang ditetapkan sebesar 60% dengan tingkat capaian 147% artinya telah melampaui target yang telah ditetapkan.

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Komitmen Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mendukung Program Walikota Dumai **Khidmat Penerangan**
- Telah diluncurkan nya Aplikasi SIM PJU (Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum) yang berfungsi untuk menerima pengaduan dan keluhan mengenai lampu-lampu jalan yang ada di seluruh Kota Dumai

c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

- Penerangan Jalan belum merata dirasakan seluruh masyarakat Kota Dumai dikarenakan keterbatasan anggaran berbanding terbalik dengan usulan kebutuhan yang masuk ditambah lagi dengan luas nya wilayah Kota Dumai

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

- Kedepannya Dinas Perhubungan Kota Dumai akan berupaya mengakomodir usulan kebutuhan dari masyarakat dengan memaksimalkan anggaran yang ada demi mendukung program Khidmat Penerangan di Kota Dumai;
- Terus mengupgrade aplikasi SIM PJU (Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum) dan mensosialisasikannya kepada masyarakat sehingga lebih maksimal dalam penggunaannya;
- Melengkapi sarana yang digunakan dalam kegiatan pengadaan dan rehabilitasi alat penerangan jalan dengan cara pengadaan mobil skylif telescopic yang dapat mengakses jalan-jalan kecil di Kota Dumai.

4. Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan, target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 1.198,23 km : 90.081 unit dan realisasi sebesar 1.198,23 km : 94.842 unit dengan tingkat capaian 95% atau bernilai kinerja sangat tinggi.

Formulasi yang digunakan dalam penghitungan indikator ini yakni:

$$\text{Panjang Jalan} : \text{Jumlah Kendaraan}$$

Panjang jalan yang dihitung pada indikator ini sesuai Keputusan Walikota Dumai Nomor 613/DPUPR/2017 Tentang Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kota yakni sepanjang 1.198,23 km dan jumlah kendaraan di Kota Dumai pada tahun 2023 sebanyak 94.842 unit kendaraan yang apabila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 4
Perkembangan Jumlah Kendaraan di Kota Dumai
Tahun 2022 dan 2023

Komponen	Satuan	Jumlah Kendaraan		Selisih
		2022	2023	
Mobil Penumpang	Unit	17.405	19.454	2.049
Bus	Unit	137	143	6
Truck	Unit	6.636	7.538	902
Sepeda Motor	Unit	61.235	67.707	6.472
TOTAL		85.413	94.842	9.429

Sumber : Satlantas Polres Dumai, 2023

- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan kurang dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar di Kota Dumai pada tahun 2023
 - Pertumbuhan jumlah kendaran yang paling banyak didominasi kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit.

c. Faktor penghambat Capaian Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan adalah sebagai berikut:

- Ideal nya Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan, sehingga bila jumlah kendaraan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dan kondisi ini dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan perlu dibarengi dengan kecepatan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik, sehingga dapat menurunkan dan/atau mengurangi risiko peningkatan angka kecelakaan dan kemacetan di jalan Kota Dumai.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel III. 5
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	60%	-	60%	-	100%	-
2.		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	60%	-	42%	-	70%	-
3.		Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	56%	-	55%	-	98%	-
4.		Persentase Pembangunan Prasarana Jalan	48%	-	48%	-	100%	-
5.		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	50%	-	0.067	-	-	-
6.	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	-	56%	-	56%	-	100%
7.		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	-	61%	-	89%	-	146%
8.		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	60%	-	88%	-	147%
9.		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	-	1.198,2 3 km : 90.081 unit	-	1.198,2 3 km: 94.842 unit	-	95%

Sumber data : Dishub Kota Dumai Tahun 2023

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1a. Pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Perhubungan selama 5 tahun kedepan, namun mengalami perubahan menjadi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama sehubungan dengan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Indikator pertama adalah persentase kepemilikan kir angkutan umum dengan target pada tahun 2022

adalah 60% berasal dari perhitungan jumlah angkutan umum yang memiliki kir pada tahun n dibagi jumlah angkutan umum pada tahun n dikali 100%, dirubah menjadi Indikator **“persentase kepemilikan kir angkutan umum dan barang”** yang berasal dari perhitungan *jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki kir pada tahun n dibagi jumlah angkutan umum dan barang pada tahun n dikali 100%*

- b. Pada tahun 2022, jumlah angkutan umum yang memiliki kir sebanyak 124 unit dengan jumlah angkutan umum pada tahun n sebanyak 297 unit. Realisasi pada tahun 2022 adalah 42% dengan capaian 70%.
- c. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 61% dan realisasinya adalah 89% dengan rincian Jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki Kir Tahun 2023 sebanyak 3.664 unit dan Jumlah angkutan umum dan barang yang wajib uji di Tahun 2023 sebanyak 4.121 capaian kinerja 146%.

2a. Indikator Kinerja Utama yang kedua adalah persentase sarana dan prasarana perhubungan dengan target pada tahun 2022 adalah 60% berasal dari perhitungan jumlah sarana dan prasarana perhubungan pada tahun n dibagi jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang seharusnya tersedia dikali 100%, dirubah menjadi Indikator **“persentase prasarana transportasi”** yang berasal dari perhitungan *jumlah prasarana transportasi pada tahun n dibagi jumlah prasarana transportasi yang seharusnya tersedia dikali 100%*

- b. Pada tahun 2022, jumlah sarana dan prasarana perhubungan sebanyak 42 unit dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang seharusnya tersedia sebanyak 70 unit. Realisasi pada tahun 2022 adalah 60% dengan capaian 100%.
- c. Pada tahun 2023 target kinerja turun menjadi 56% dan realisasinya adalah 56% dengan rincian jumlah prasarana transportasi pada tahun 2023 sebanyak 5 unit dengan target jumlah prasarana yang seharusnya tersedia sebanyak 9 unit capaian kinerja 100%.

3a. Indikator Kinerja Utama yang ketiga adalah persentase penyediaan lalu lintas dan angkutan jalan dengan target pada tahun 2022 adalah 55% dan indikator persentase pembangunan prasarana jalan dengan target 48% digabungkan dan dirubah menjadi satu indikator yakni **“persentase penyediaan lalu lintas dan angkutan jalan”** yang berasal dari perhitungan *jumlah perlengkapan jalan yang*

tersedia pada tahun n dibagi jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia dikali 100%.

- b. Pada tahun 2022, indikator persentase penyediaan perlengkapan jalan, jumlah perlengkapan jalan yang dilaksanakan di tahun 2022 yakni pengadaan penerangan jalan umum terealisasi 883 unit lampu dari target 800 unit lampu dengan persentase 110%, pembangunan pedestrian sepanjang 198 m dari target 2.116,20 meter dengan persentase 9% dan penyediaan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas terealisasi 316 unit dari target 700 unit dengan persentase 45%, sehingga total keseluruhan indikator ini yakni 164% dengan rata-rata capaian pada tahun 2022 sebesar 55%.

Indikator persentase pembangunan prasarana jalan, telah tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana jumlah prasarana jalan berupa halte yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai sebanyak 29 unit yang tersebar di seluruh Kota Dumai yakni Halte SMPN Binsus, Halte SMAN 2, Halte TK Tunas Harapan, Halte Disdukcapil, Halte SMPN 2, Halte PLN, Halte Ramayan, Halte Kampu STIA, Halte Marlan Jaya, Halte Beringin Patra, Halte Wilmar Arifin A1, Halte Wilmar Arifin A2, Halte Wilmar Arifin A3, Halte Wilmar Arifin A4, Halte Wilmar Arifin A5, Halte Wilmar Arifin A6, Halte Wilmar Arifin A7, Halte SMAN 1, Halte STT, Halte SDN 005 Bukit Jin, Halte Puskesmas Bukit Kayu Kapur, Halte Wilmar Datuk Laksaman, Halte Pelabuhan Penumpang, Halte Simpang Sui, Halte SMKN 1, Halte Jaya Mukti, Halte Taman Mitra.

- c. Pada tahun 2023, kedua Indikator diatas dirubah dan digabungkan menjadi 1 (satu) indikator yaitu persentase penyediaan lalu lintas dan angkutan jalan, target kinerja naik menjadi 60% dan realisasinya adalah 88% dengan rincian perlengkapan jalan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 yakni Pengadaan Rambu Lalu Lintas sebanyak 216 unit dari target 86 unit, Alat Penerangan Jalan sebanyak 991 unit dari target 800 unit, Marka Jalan di 8 lokasi dari target 15 lokasi, Alat pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebanyak 506 unit dari target 500 unit. Sehingga jika dirata-ratakan seluruh pengadaan perlengkapan jalan di Tahun 2023 sebesar 88% dari target yang ditetapkan sebesar 60% dengan tingkat capaian 147%.

- 4a. Indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dengan target pada tahun 2022 adalah 50% yang berasal dari perhitungan jumlah kendaraan dibagi panjang jalan
- b. Pada tahun 2022, panjang jalan di Kota Dumai sepanjang 1.198,23 km dan jumlah kendaraan di Kota Dumai sebanyak 85.413 unit dengan rincian: Mobil Penumpang 17.405 unit, Bus 137 unit, Truck 6.636 unit dan Sepeda Motor 61.235 unit. Dengan formulasi perhitungan jumlah kendaraan dibagi panjang jalan sehingga realisasi pada tahun 2022 adalah 67,21 unit/km.
- c. Pada tahun 2023, formulasi yang digunakan untuk menghitung indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Sehingga bila menggunakan formulasi saat ini, untuk tahun 2022 capaian indikatornya sebesar 94% sedangkan di tahun 2023 tingkat capaiannya 95% artinya terjadi peningkatan 1% hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah kendaraan di Kota Dumai sebanyak 9.429 unit bila dibandingkan dengan tahun lalu.

Pada Tahun 2023, Panjang jalan di Kota Dumai sepanjang 1.198,23 km dibanding jumlah kendaraan di Kota Dumai sebanyak 94.842 unit, dengan target $1.198,23 \text{ km} : 90.081 \text{ unit}$ dengan tingkat capaian indikator sebesar 95%.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) tahun 2023 dapat dikatakan *SANGAT BERHASIL*.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III. 6
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	89%	56%	63%
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	82%	89%	109%
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	80%	88%	110%
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km: 102.873 unit	1.198,23 km: 94.842 unit	95%

Sumber data : Dishub Kota Dumai Tahun 2023

Upaya Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator persentase prasarana transportasi, Dinas Perhubungan telah berupaya untuk melakukan:
 - Menyusun rencana pembangunan prasarana transportasi sebagaimana yang telah tertuang di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026
2. Capaian Indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang meskipun pada tahun 2023 telah melebihi target akhir periode Renstra, namun Dinas Perhubungan terus berupaya untuk:
 - Meningkatkan kapasitas SDM Penguji Kendaraan Bermotor
 - Peningkatan sarana dan prasarana pengujian
 - Mensosialisasikan pentingnya menguji kelayakan kendaraan kepada masyarakat pengguna jalan
3. Capaian Indikator Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meskipun pada tahun 2023 telah melebihi target akhir periode Renstra, namun Dinas Perhubungan terus berupaya untuk:
 - Mengakomodir dan memprioritaskan usulan kebutuhan masyarakat
 - Upgrade aplikasi penerangan jalan umum

4. Capaian Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan perlu dibarengi dengan kecepatan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik, sehingga dapat menurunkan dan/atau mengurangi risiko peningkatan angka kecelakaan dan kemacetan di jalan Kota Dumai.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel III. 6 berikut :

Tabel III. 7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	56%	-	Tidak Ada Target Nasional yang berhubungan langsung dengan kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	89%	-	
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	88%	-	
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km: 94.842 unit	-	

Sumber data : Dishub Kota Dumai Tahun 2023

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 74.605.852.140,00 (Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 63.942.061.307,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp 10.663.790.833,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)

1. Belanja Operasi	:	Rp	63.942.061.307,00
2. Belanja Modal	:	Rp	10.663.790.833,00
J u m l a h	:	Rp	74.605.852.140,00

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 73.969.713.462,39 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp 63.346.121.405,57 (Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Koma Lima Puluh Tujuh Rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp 10.623.592.056,82 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Sembilan Kota Delapan Puluh Dua Rupiah)

1. Belanja Operasi	:	Rp	63.346.121.405,57
2. Belanja Modal	:	Rp	10.623.592.056,82
J u m l a h	:	Rp	73.969.713.462,39

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel III. 8
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	46.712.912.299,00	46.268.560.826,80	99,05
2		Program Pengelolaan Pelayaran	150.000.000,00	149.940.230,00	99,96

Sumber data : Dishub Kota Dumai Tahun 2023

Total anggaran belanja adalah Rp 46.862.912.299,00 dengan realisasi Rp 46.418.501.056,80 atau dengan capaian sebesar 99,05% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya:

- o Secara umum, seluruh kegiatan pada 2 (dua) program prioritas diatas telah selesai dan terealisasi 100% fisiknya, namun realisasi keuangannya terealisasi sebesar 99,05% atau sisa 0,95% yang merupakan silpa dari setiap sub-sub kegiatan. Artinya adanya efisiensi dari penggunaan anggaran di tahun 2023.

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III. 9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	65%					
Sasaran: Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	56%	56%	100%			
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	61%	89%	146%			
	Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	60%	88%	147%			
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km: 90.081 unit	1.198,23 km : 94.842 unit	95%			
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	95%	100%	105%	46.712.912.299,00	46.268.560.826,80	99,05%
Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase Tersedianya Prasarana Pelayanan sesuai Kewenangan Kota	20%	20%	100%	150.000.000,00	149.940.230,00	99,96%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	100%	100%	100%	27.742.939.841,00	26.508.382.311,59	95,55%

Sumber data : Dishub Kota Dumai Tahun 2023

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mengukur akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III. 10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi		Keterangan
1	2	3	4	5	6		7
2.	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Persentase Prasarana Transportasi	100%	99,05	1,01	Efisien	-
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	146%	99,05	1,47	Efisien	-
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	147%	99,05	1,48	Efisien	-
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	95%	99,05	0,96	Kurang Efisien	

Sumber data : Dishub Kota Dumai Tahun 2023

- Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Persentase Prasarana Transportasi tingkat efisiensinya adalah 1,01 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang adalah 1,47 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (146%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- Pada Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat efisiensinya adalah 1,48 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (147%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

- d. Pada Indikator Kinerja Utama 4 yaitu Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan tingkat efisiensinya adalah 0,96 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (95%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**;

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.11
Prestasi dan Penghargaan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Implementasi SAKIP Internal	Peringkat Pertama Kluster Pendukung	Kota Dumai	Walikota Dumai

Sumber data : Dishub Kota Dumai Tahun 2023

Pada Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Dumai mendapatkan penghargaan dari Walikota Dumai sebagai **PERINGKAT PERTAMA** pada Kluster Pendukung berkaitan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Predikat **“BB” (SANGAT BAIK)** dengan nilai **77,85**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kota Dumai. LKj-IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKj-IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 dengan kesesuaian Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, Dokumen RKPD tahun 2022, Capaian IKU Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023 serta Perjanjian Kinerja 2023 beserta perubahannya. Dalam laporan ini mengukur Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai yang terdiri atas 4 Kinerja Utama dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan hasil sebagai berikut:

1. *Indikator 1 Persentase Prasarana Transportasi* dengan capaian 100% pada Tahun 2023 berasal dari perhitungan jumlah prasarana transportasi pada tahun n dibagi jumlah prasarana transportasi yang seharusnya tersedia dikali 100%. Dari target 56% bisa terealisasikan 56% dan termasuk kategori *SANGAT BERHASIL*
2. *Indikator 2 Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang* dengan capaian 146% pada Tahun 2023 berasal dari perhitungan jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki kir pada tahun n dibagi jumlah angkutan umum dan barang pada tahun n dikali 100%. Dari target 61% dapat terealisasikan 89% dan termasuk kategori *SANGAT BERHASIL*
3. *Indikator 3 Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* dengan capaian 147% pada tahun 2023 berasal dari perhitungan *jumlah perlengkapan jalan yang tersedian pada tahun n dibagi jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia dikali 100%*. Dari target 60% dapat terealisasikan 88% dan termasuk kategori *SANGAT BERHASIL*

4. Indikator 4 *Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan* dengan capaian 95% pada tahun 2023 berasal dari perhitungan panjang jalan dibagi jumlah kendaraan. Dari target 1.198,23 km : 90.081 unit dapat terealisasi 1.198,23 km : 94.842 km dan termasuk kategori *SANGAT BERHASIL*.

B. LANGKAH PERBAIKAN / SARAN

1. Dinas Perhubungan Kota Dumai telah merencanakan Pembangunan Prasarana Transportasi yang telah tertuang didalam dokumen Perubahan Rencana Strategis 2021-2026 yang diharapkan dapat terealisasi;
2. UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor agar lebih meningkatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor serta mensosialisasikan pentingnya pengujian dan memastikan kelaian jalan kendaraan bagi masyarakat pengguna jalan;
3. Memprioritaskan penyediaan perlengkapan jalan di daerah yang belum tersentuh infrastruktur perhubungan;
4. Memberikan saran dan masukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai terkait peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik haruslah sejalan dengan pertumbuhan kendaraan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dumai, 10 Januari 2024
KEPALA,

SAID EFFENDI, SE
Pembina
NIP. 19800201 200604 1 013

RENCANA KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

NO	KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)
	URAIAN 2	INDIKATOR 3	TARGET 4	URAIAN 10	INDIKATOR 11	TARGET 12	URAIAN 14	INDIKATOR 15	TARGET 16	
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Keselamatan Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	Program Penyelenggaraan Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tersedianya Lintas Perhubungan Darat yang Layak	95%	Penerapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Umum Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	10 Dokumen	870.386,035
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%			70	Pengadaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 Unit	50.000,000
		Persentase Penyediaan Perlingkapan Jalan	%			61	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Perizinan dan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2 Laporan	383.350,000
		Persentase Pembangunan Prasarana Jalan	%			48	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 Unit	114.251,700
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	%			52	Penyediaan Perlingkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlingkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1200 unit	17.765.157,069
		Jumlah Pelabuhan Lokal	Unit			1	Revisi dan Managemen dan Rekayasa Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Managemen dan Rekayasa Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.359,995
							Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	138.074,000
							Penerapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	24.990,000
							Penerapan Rencana Induk dan Daerah Lingkup Kerja (DLKR)/Daerah Lingkup Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkup Kerja (DLKR)/Daerah Lingkup Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	150.000,000
							Program Pelayaran			
										18.998.666,799





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAID EFFENDI, SE**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI**

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023

Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama,

SAID EFFENDI, SE
 NIP. 19800201 200604 1 013

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Keselamatan Perhubungan serta	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	65
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	70
		Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	%	61
		Persentase Pembangunan Prasarana Jalan	%	48
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	%	52
		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal	Unit	1

1 Sasaran 1

Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	19.846.555.799
2.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp.	150.000.000
	JUMLAH	Rp.	19.996.555.799

Dumai, Januari 2023





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAID EFFENDI, SE
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM., MARS
Jabatan : WALIKOTA DUMAI
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai, 25 September 2023


 PIHAK KEDUA
WALIKOTA
 H. PAISAL, SKM., MARS


 PIHAK PERTAMA
KEPALA
 SAID EFFENDI, SE
 Pemula
 NIP. 19800201 200604 1 013

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sesuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terselenggaranya Lulu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	-
2		Persentase Prasarana Transportasi	%	56
3		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	-
4		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum dan Barang	%	61
5		Persentase Penyediaan Perlempangan Jalan	%	-
6		Persentase Pembangunan Prasarana Jalan	%	-
7		Persentase Penyediaan Lulu Lintas dan Angkutan Jalan	%	60
8		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	%	-
9		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	km/unit	0,013
10		Jumlah Pelebaran Pengumpulan Lokal	unit	-

Sasaran 1	Terselenggaranya Lulu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Program Penyelenggaraan Lulu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	46,012,912,299
		2. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp.	150,000,000
		Jumlah	Rp.	46,162,912,299



PENGUKURAN KINERJA

Nama OPD : Dinas Perhubungan Kota Dumai
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	$\frac{\text{Jumlah prasarana transportasi pada tahun n}}{\text{Jumlah prasarana transportasi yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	56%	56%	100%
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki Kir pada tahun n}}{\text{Jumlah angkutan umum dan barang pada tahun n}} \times 100\%$	61%	89%	146%
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	$\frac{\text{Jumlah perlingkapan jalan yang tersedia pada Tahun n}}{\text{Jumlah perlingkapan jalan yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	60%	88%	147%
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Panjang jalan : jumlah kendaraan	1.198,23 km : 90.081 unit	1.198,23 km : 90.081 unit	95%

Pagu Anggaran Program Tahun 2023 : Rp 46.862.912.299,00
Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 : Rp 46.418.501.056,80
Persentase Capaian Program Tahun 2023 : Rp 99,05%



PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2023

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI CAPAIAN		% FISIK	% KEUANGAN	SISA ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27,742,939,841	598	27,551,212,405.59	100.00%	99.31%	191,727,435.41
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64,520,000	7	64,516,500.00	100.00%	99.99%	3,500.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,700,000	3	24,698,500.00	100.00%	99.99%	1,500.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18,650,000	1	18,650,000.00	100.00%	100.00%	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,000,000	1	6,000,000.00	100.00%	100.00%	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,170,000	2	15,168,000.00	100.00%	99.99%	2,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,424,316,360	3	9,328,570,443.00	100.00%	98.98%	95,745,917.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,370,306,360	1.00	9,274,594,943.00	1.00	98.98%	95,711,417.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,310,000	1	20,302,300.00	100.00%	99.96%	7,700.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33,700,000	2	33,673,200.00	100.00%	99.92%	26,800.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,000,000	1.00	14,850,000.00	100.00%	99.00%	150,000.00
Penelausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,000,000	1	14,850,000.00	100.00%	99.00%	150,000.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70,791,000	13	69,525,654.00	100.00%	98.21%	1,265,346.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11,375,000	5	11,336,000.00	100.00%	99.66%	39,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59,416,000	13	58,189,654.00	100.00%	97.94%	1,226,346.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,675,729,850	6.00	1,671,108,726.00	100.00%	99.72%	4,621,124.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,531,400	1.00	99,511,688.00	100.00%	99.98%	19,712.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190,142,992	1.00	190,003,439.00	100.00%	99.93%	139,553.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105,440,000	1.00	105,429,125.00	100.00%	99.99%	10,875.00
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	214,969,390	1.00	214,955,425.00	100.00%	99.99%	13,965.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	69,902,000	1.00	68,303,571.00	100.00%	97.59%	1,688,429.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	975,654,068	1.00	972,920,478.00	100.00%	99.72%	2,733,590.00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20,000,000	1.00	19,985,000.00	100.00%	99.93%	15,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,539,053,965	357	2,537,030,869.50	100.00%	99.92%	2,023,095.50
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125,208,000	1	125,160,000	100.00%	99.96%	48,000.00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,150,000,000	1	1,150,000,000	100.00%	100.00%	-
Pengadaan Mebel	312,426,488	229	312,025,069.50	100.00%	99.87%	401,418.50

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI CAPAIAN		% FISIK	% KEUANGAN	SISA ANGGARAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	641,419,477	123	640,178,000	100.00%	99.81%	1,241,477.00
Pengadaan Aset Tak Berwujud	310,000,000	3	309,667,800	100.00%	99.89%	332,200.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,911,849,966	3.00	10,826,038,336.00	100.00%	99.21%	85,811,630.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,152,000	1	3,130,000.00	100.00%	99.30%	22,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,078,373,450	1.00	1,034,296,414.00	100.00%	95.91%	44,077,036.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,830,324,516	1.00	9,788,611,922.00	100.00%	99.58%	41,712,594.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,041,678,700	208	3,039,571,877.09	100.00%	99.93%	2,106,822.91
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	772,070,000	35	771,970,500.00	100.00%	99.99%	99,500.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,180,158,700	157	1,179,351,600.00	100.00%	99.93%	807,100.00
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	150,000,000	2	149,844,450.00	100.00%	99.90%	155,550.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	939,450,000	14	938,405,327.09	100.00%	99.89%	1,044,672.91
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	46,712,912,299	2,882	46,268,560,826.80	100.00%	99.05%	444,351,472.20
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1,341,788,035	13	1,340,627,977.00	100.00%	99.91%	1,160,058.00
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1,341,788,035	13	1,340,627,977.00	100.00%	99.91%	1,160,058.00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	36,754,546,870	2,841	36,418,898,557.11	100.00%	99.09%	335,648,312.89
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3,054,903,500	2	3,026,336,659.51	100.00%	99.06%	28,566,840.49
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8,043,988,500	1,679	8,035,487,773.85	100.00%	99.89%	8,500,726.15
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	524,820,301	8	524,014,070.00	100.00%	99.85%	808,231.00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	25,130,834,569	1,152	24,833,060,053.75	100.00%	98.82%	297,774,515.25
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	50,000,000	1	49,950,000.00	100.00%	99.90%	50,000.00
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Terintegrasi secara Elektronik	50,000,000	1	49,950,000.00	100.00%	99.90%	50,000.00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1,446,993,989	1.00	1,440,332,669.90	100.00%	99.54%	6,661,319.10
Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1,446,993,989	1.00	1,440,332,669.90	100.00%	99.54%	6,661,319.10
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4,877,388,418	21	4,870,431,061.79	100.00%	99.86%	6,957,348.21
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4,602,160,710	21	4,597,950,200.00	100.00%	99.91%	4,210,510.00

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI CAPAIAN		% FISIK	% KEUANGAN	SISA ANGGARAN
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	31,527,700	2	28,836,164.00	100.00%	91.48%	2,691,536.00
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12,500,000	655	12,500,000.00	100.00%	100.00%	-
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	120,000,000	1	119,970,197.79	100.00%	99.98%	29,802.21
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	61,200,000	1	61,194,500.00	100.00%	99.99%	5,500.00
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50,000,000	1	49,980,000.00	100.00%	99.96%	20,000.00
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	978,959,995	3.00	977,836,500.00	100.00%	99.89%	1,123,495.00
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	113,500,000	1	113,491,500.00	100.00%	99.99%	8,500.00
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	827,650,000	1.00	826,560,000.00	100.00%	99.87%	1,090,000.00
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	37,809,995	1	37,785,000.00	100.00%	99.93%	24,995.00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,235,255,000	1.00	1,142,892,816.00	100.00%	92.52%	92,362,184.00
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1,235,255,000	1.00	1,142,892,816.00	100.00%	92.52%	92,362,184.00
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27,980,000	1	27,591,245.00	100.00%	98.61%	388,755.00
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27,980,000	1	27,591,245.00	100.00%	98.61%	388,755.00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	150,000,000	2	149,940,230.00	100.00%	99.96%	59,770.00
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	150,000,000	2	149,940,230.00	100.00%	99.96%	59,770.00
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	150,000,000	2	149,940,230.00	100.00%	99.96%	59,770.00
TOTAL	74,605,852,140		73,969,713,462.39	100.00%	99.15%	636,138,677.61

Dumai, 04 Januari 2024
 KEPALA
 DINAS PERHUBUNGAN
 SAIQ EFFENDI, SE
 Pembina
 NIP. 19800201 200604 1 013

PENGHARGAAN YANG DIPEROLAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
TAHUN 2023

